

BAB II

KAJIAN TENTANG SURAT KABAR, PEMBERITAAN, IDEOLOGI MEDIA, MEDIA DAN BERITA DILIHAT DARI PARADIGMA KONSTRUKSIONIS, ANALISIS FRAMING PAN DAN KOSICKI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN HAJI

2.1 Surat Kabar

Surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu satu kali (Djuroto, 2002:11).

2.1.1. karakteristik surat kabar

a. Publisitas

Publisitas atau *publicity* adalah penyebaran pada publik atau khalayak. Dengan demikian, semua aktivitas manusia yang menyangkut kepentingan umum dan atau menarik untuk umum adalah layak untuk disebarluaskan. Pesan-pesan melalui surat kabar harus memenuhi kriteria tersebut.

b. Perioditas

Perioditas menunjuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan. Sifat perioditas sangat penting dimiliki media massa, khususnya surat kabar. Kebutuhan manusia akan informasi sama halnya dengan kebutuhan manusia akan makan, minum, dan pakaian. Setiap hari manusia selalu membutuhkan informasi. Bagi penerbit surat kabar, selama ada dana dan tenaga yang terampil, tidaklah sulit untuk menerbitkan surat kabar secara periodik.

c. Universalitas

Universalitas menunjuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian atau isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatannya bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

d. Aktualitas

Aktualitas, menurut kata asalnya, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya” kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan berita, karena definisi berita adalah

laporan tercepat mengenai fakta-fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar orang.

Laporan tercepat menunjuk pada “kekinian” atau terbaru dan masih hangat. Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan, karena khalayakpun memerlukan informasi yang paling baru. Hal ini dilakukan oleh surat kabar, karena surat kabar sebagian besar memuat berbagai jenis berita.

e. Terdokumentasi

Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa diantaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat kliping. Misalnya karena berita tersebut berkaitan dengan instansinya, atau artikel itu bermanfaat untuk menambah pengetahuannya. Kliping berita oleh sebuah instansi biasanya dilakukan oleh staf *public relations* untuk dipelajari dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya karena berita tersebut dianggap sebagai masukan dari masyarakat (public eksternal) (Ardianto dan Erdiana, 2004: 104-106).

2.1.2. Fungsi Surat Kabar

Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif), fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya sebagian besar rubrik surat kabar terdiri dari berbagai jenis berita. Namun demikian, fungsi hiburan surat kabar pun tidak terabaikan karena tersedianya rubrik artikel ringan, *feature* (laporan perjalanan, laporan tentang profil seseorang yang unik), rubrik cerita bergambar atau komik, serta cerita bersambung. Begitu pula dengan fungsinya mendidik dan memengaruhi akan ditemukan pada artikel ilmiah, tajuk rencana atau editorial dan rubrik opini. Fungsi pers, khususnya surat kabar bertambah, yakni sebagai alat control sosial yang konstruktif (Ardianto dan Erdiana, 2004: 104).

2.2 Pemberitaan

Sebelum memaparkan pemberitaan, lebih dahulu penulis menguraikan apa yang dimaksud dengan berita. Penjelasan mengenai hal ini menjadi penting supaya tidak menimbulkan salah tangkap atau salah paham.

2.2.1. Berita

Kata berita berasal dari bahasa Sanskerta *vrit*, yang secara harfiah berarti ada atau terjadi. Adapun dalam bahasa Inggris, berita disebut *write* yang artinya menulis. Selanjutnya, oleh sebagian orang Indonesia istilah-istilah tersebut dilafalkan menjadi istilah *vritta* atau berita.

Berita adalah semua hasil laporan, baik secara lisan ataupun tulisan yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Sebagian bentuk laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian baru/aktual. Informasi yang disampaikan sebagai bahan berita pun harus dianggap penting dan menarik bagi banyak orang.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa berita erat kaitannya dengan informasi dan kebutuhan banyak orang. Kebutuhan terhadap berita antara saat ini dan beberapa saat yang akan datang tentu berbeda. Untuk itu, berita harus bersifat faktual dan aktual. Faktual artinya berdasarkan kenyataan sedangkan aktual artinya bersifat kekinian atau terbaru. Selain bersifat faktual dan aktual, berita harus bersifat objektif. Objektif artinya disajikan tanpa campuran emosi atau pendapat pribadi penulis berita atau wartawan (Cahya, 2012: 2).

2.2.2. Pengertian Pemberitaan

Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, Pemberitaan berarti proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan), perkabaran; maklumat (Sumber: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberitaan> diakses pada 19 Desember 2016).

Pemberitaan atau bisa juga disebut reportase juga mempunyai makna melaporkan, memberi laporan, dan memberitakan (Abdullah, 1992: 66). Reportase mencakup kegiatan meliput, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai sumber/narasumber, kemudian menuliskannya dalam bentuk berita (produk) (Kuncoro, 2009: 66).

2.2.3. Dasar Pemberitaan

Berita yang ditampilkan di berbagai media tidak terlepas dari ketentuan atau hal-hal yang menjadi dasar pemberitaan. Kebebasan pers di negara kita memang telah dilindungi. Setiap orang bebas menyampaikan maupun menikmati berbagai macam berita. Namun, alangkah baiknya jika kita mengetahui dasar pemberitaan resmi di Indonesia terlebih dahulu. Dasar pemberitaan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan *Code Of Conduct*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 isinya membatasi media pers dari hal-hal yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Undang-undang ini dijadikan sumber hukum tertulis. Jika media pers melangarnya, mereka dapat dituntut secara hukum di pengadilan.

Kode Etik Jurnalistik membatasi para jurnalis atau wartawan tentang hal-hal baik dan tidak baik untuk diberitakan. Kode Etik ini dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Wartawan. Sanksi bagi si pelanggar bersifat moral, yaitu hanya berupa sanksi sosial, skors, atau pemberian peringatan.

Code of Conduct merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh media pers tertentu tentang apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Ruang lingkup peraturan ini lebih sempit karena hanya diberlakukan untuk wartawan yang bekerja di media tersebut. Sanksi bagi pelanggarnya ditentukan sendiri oleh media pers yang mengeluarkan *Code of Conduct*, misalnya *skorsing* dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan *Code of Conduct* itulah yang menjadi dasar pemberitaan di Indonesia (Cahya, 2012: 3-4).

2.2.4. Fungsi Pemberitaan

Pada hakikatnya, fungsi utama pemberitaan adalah untuk melaporkan atau memberi tahu sesuatu hal kepada khalayak. Memilih, mengolah, dan menerbitkan suatu berita adalah tugas media pers. Segala informasi yang diberitakan harus diperhitungkan nilai gunanya bagi kepentingan masyarakat.

Berikut ini ada dua hal yang perlu diperhatikan media pers dalam memenuhi nilai guna atau manfaat bagi khalayak. *Pertama*, berita harus dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan umum. Pengetahuan bersifat dinamis, artinya bahwa pengetahuan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Untuk itu, kebutuhan akan pengetahuan tidak cukup berhenti pada saat tertentu. *Kedua*, berita harus dapat dimanfaatkan sebagai alat control sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Berita bukan hanya menyampaikan informasi-informasi yang menyenangkan, melainkan juga informasi yang tidak menyenangkan, atau sering disebut “berita buruk” (Cahya, 2012: 5-6).

2.3 Ideologi Media

Sebuah teks berita tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Seseorang yang membaca suatu teks berita tidak menemukan makna dalam teks, sebab yang dia temukan dan hadapi secara langsung adalah pesan dalam teks. Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks secara bersama-sama mempunyai andil yang sama dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan itu menempatkan seseorang sebagai suatu bagian dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar di mana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja (Eriyanto, 2001:14).

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya difahami, bagaimana realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. Pendefinisian itu bukan hanya pada peristiwa, melainkan juga aktor-aktor sosial. Di antara fungsi dari media dalam mendefinisikan realitas, fungsi pertama dalam ideologi adalah media sebagai mekanisme integrasi sosial. Media di sini berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan. Salah satu kunci dari fungsi semacam ini adalah bidang atau batas budaya. Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam tata nilai yang sama, pandangan atau nilai harus didefinisikan sehingga keberadaannya diterima dan diyakini kebenarannya. Dalam kerangka ini, media dapat mendefinisikan nilai dan perilaku atau yang sesuai dengan nilai kelompok dan perilaku atau nilai yang dianggap menyimpang. Perbuatan, sikap, atau nilai yang menyimpang tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau alamiah, tetapi dikonstruksi (Eriyanto, 2002: 122).

Daniel Hallin membuat ilustrasi dan gambaran menarik yang menolong menjelaskan bagaimana berita kita tempatkan dalam bidang/peta ideologis. Ia membagi dunia jurnalistik ke dalam tiga bidang, yaitu bidang penyimpangan, bidang kontroversi, dan bidang konsensus. Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis.

Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda karena memakai kerangka yang berbeda. Masyarakat atau komunitas dengan ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan meletakkan peristiwa yang sama tersebut ke dalam peta yang berbeda, karena ideologi menempatkan bagaimana nilai-nilai bersama yang difahami dan diyakini

secara bersama-sama dipakai untuk menjelaskan berbagai realitas yang hadir setiap hari (Eriyanto, 2002:127-128).

2.4 Media Dan Berita Dilihat Dari Paradigma Konstruksionis

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam konsepsi positivis diandaikan ada realitas yang bersifat “eksternal” yang ada dan hadir sebelum wartawan meliputnya. Jadi, ada realitas yang bersifat objektif, yang harus diambil dan diliput oleh wartawan. Pandangan semacam ini sangat bertolak belakang dengan pandangan konstruksionis. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita. Fakta/realitas pada dasarnya dikonstruksi. Manusia membentuk dunia mereka sendiri. Dalam kata-kata yang terkenal dari Carey, realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, realitas sebaliknya diproduksi. Pertanyaan utama dalam pandangan konstruksionis adalah fakta berupa kenyataan itu sendiri bukan sesuatu yang terberi, melainkan ada dalam benak kita, yang melihat fakta tersebut. Kitalah yang memberi definisikan menentukan fakta tersebut sebagai kenyataan.

Karena fakta itu diproduksi dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung pada bagaimana iadilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi. Dalam kata-kata yang ekstrim, realitas atau fakta itu tergantung pada bagaimana ia dilihat. Pikiran dan konsepsi kitalah yang membentuk dan mengkreasikan fakta.

Media adalah agen konstruksi. Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan positivis, media dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak). Media dilihat murni sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita. Pandangan semacam ini, tentu saja melihat media bukan sebagai agen melainkan hanya saluran. Media dilihat sebagai sarana yang netral. Kalau ada berita yang menyebutkan kelompok tertentu atau menggambarkan

realitas dengan citra tertentu, gambaran semacam itu merupakan hasil dari sumber berita (komunikator) yang menggunakan media untuk mengemukakan pendapatnya. Pendeknya, media disini tidak berperan dalam membentuk realitas. Apa yang tampil dalam pemberitaan itulah yang sebenarnya terjadi. Ia hanya saluran untuk menggambarkan realitas, menggambarkan peristiwa.

Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat sebaliknya. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksidari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.

Media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa, bisa jadi (hanya) peristiwa bentrokan itu saja yang diberitakan, sementara peristiwa demonstrasi yang berlangsung damai, luput atau tidak mendapat tempat dalam pemberitaan. Media juga memilih (secara sadar atau tidak) aktor demonstrasi yang dijadikan sumber berita sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan. Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa. Lewat bahasa yang dipakai, media dapat menyebut mahasiswa sebagai pahlawan, dapat juga menyebutnya sebagai perusuh. Lewat pemberitaan pula, media dapat membingkai peristiwa demonstrasi dengan bingkai tertentu yang pada akhirnya menentukan bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu.

Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas. Dalam pandangan positivis, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan. Kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Tetapi dalam pandangan konstruksionis, berita itu ibaratnya sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Seperti sebuah drama, tentu saja ada pihak yang didefinisikan sebagai pahlawan (hero), tetapi ada juga pihak yang didefinisikan sebagai musuh dan pecundang. Semua itu dibentuk layaknya sebuah drama yang dipertontonkan kepada publik.

Dalam pandangan kaum positivis, berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas. Berita adalah *mirror of reality*, karenanya ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Pandangan ini ditolak oleh kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda. Perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan berita tidak dianggap salah, tetapi sebagai suatu kewajaran. Perbedaan antara pendekatan positivis dan konstruksionis dalam memahami berita, mengakibatkan perbedaan pula dalam hal bagaimana hasil kerja seorang wartawan seharusnya dinilai. Karena seandainya ada realitas yang objektif, maka berita yang baik haruslah mencerminkan realitas tersebut. Hal yang berbeda dalam konsepsi konstruksionis. Berita bukanlah representasi dari realitas. Berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku jurnalistik. Semua proses konstruksi (memulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan khalayak.

Berita bersifat subjektif/konstruksi atas realitas. Pandangan konstruksionis mempunyai penilaian yang berbeda dalam menilai objektivitas jurnalistik. Hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah standar yang rigid, seperti halnya positivis. Hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Karenanya, ukuran yang baku dan standar tidak bisa dipakai. Kalau ada perbedaan antara berita dengan realitas yang sebenarnya maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang seperti itulah pemaknaan mereka atas realitas.

Pada pendekatan positivis, titik perhatiannya adalah pada bias. Artinya, bias dianggap salah, dan wartawan harus menghindari bias. Dalam tradisi penelitian positivis, analisis diarahkan untuk menemukan ada tidaknya bias dengan meneliti sumber berita, pihak-pihak yang diwawancarai, bobot dari penulisan, dan sebagainya. Hal inilah yang berbeda dengan pendekatan konstruksionis. Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber lain; menempatkan wawancara seorang tokoh lebih besar dari tokoh lain; liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain; tidak berimbang dan

secara nyata memihak satu kelompok, kesemuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktek yang dijalankan oleh wartawan. Konstruksi wartawan dalam memaknai realitas yang secara strategismenghasilkan laporan semacam itu.

Wartawan Bukan Pelapor. Ia Agen Konstruksi Realitas. Dalam pandangan konstruksionis wartawan tidak menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya, karena ia merupakan bagian yang intrinsik dalam pembetulan berita. Lagi pula, berita bukan hanya produk individu, melainkan juga bagian dari proses organisasi dan interaksi wartawan. Dalam banyak kasus; topic apa yang diangkat dan siapa yang diwawancarai, disediakan oleh kebijakan redaksional tempat wartawan bekerja, bukan semata-mata bagian dari pilihan profesional individu. Dalam pandangan konstruksionis, wartawanjuga dipandang sebagai actor/agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membujuk peristiwa dalam pemahaman mereka.

Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Pandangan positivis melihat berita sebagai sesuatu yang objektif. Konsekuesinya, apa yang diterima khalayak pembaca seharusnya sama dengan apa yang disampaikan oleh pembuat berita. Kalau wartawan menulis berita tentang perkosaan, pesan yang diterima oleh khalayak seharusnya juga berita mengenai perkosaan. Kalau wartawan hendak melucu, khalayak seharusnya juga tertawa dengan berita yangdia baca atau tayangan yang tengah ditonton. Berita dalam paradigma ini tidak ubahnya seperti sebuah pesan yang ditransmisikan dan dikirimkan kepada pembaca. Pembuat berita dilihat sebagai pihak yang aktif, sementara pembaca dilihat sebagai pihak yang pasif. Berita lalu dimaknai mempunyai efek tertentu yang harus diperhitungkan oleh pengelola media ketika memproduksi berita.

Pandangan konstruksionis mempunyai pandangan yang berbeda. Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif. Ia juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. Dalam bahasa Stuart Hall, makna dari suatu teks bukan terdapat dalam pesan/berita yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu potensial mempunyai banyak arti (polisemi). Makna lebih tepat dipahami bukan sebagai suatu transmisi (penyebaran) dari pembuat berita ke pembaca. Ia lebih tepat dipahami sebagai sebagai suatu praktik penandaan. Karenanya, setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama. Kalau saja ada makna yang dominan atau tunggal, itu bukan berarti makna terdapat dalam teks, tetapi begitulah praktek penandaan yang terjadi. Sebuah foto yang sebetulnya

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan stop kekerasan dan seksual, bisa jadi dimaknai pembaca sebagai menyebarkan pronografi. Sebuah lelucon bisa dimaknai dan ditafsirkan oleh pembaca sebagai sebuah penghinaan. Semua pemaknaan ini mungkin sekali terjadi. Pembaca yang mempunyai posisi berbeda bisa membaca teks dengan cara yang berbeda pula dengan pembaca lain. Kalau terjadi perbedaan semacam ini, bukanlah berarti tersebut buruk (Eriyanto, 2002: 19-36)

2.5 Analisis Framing

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955.

Analisis *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang *framing* atau *frame* sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Sobur, 2002: 161-162).

Sedangkan menurut Pan dan Kosicki, analisis *framing* menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif. *Framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.

Pan dan Kosicki menjelaskan lebih lanjut bahwa konsepsi *framing* dibagi menjadi dua konsep. *Pertama*, konsepsi psikologi. Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Dan yang *kedua*, konsepsi sosiologis. Kalau pandangan psikologis lebih melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu,

maka pandangan sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas (Eriyanto, 2002: 251-253).

Bagi Pan dan Kosicki, framing pada dasarnya melibatkan kedua konsepsi tersebut. Keterkaitan kedua konsepsi tersebut terlihat suatu berita diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan. *Pertama*, proses konstruksi tersebut melibatkan nilai sosial yang melekat pada diri wartawan. Nilai sosial yang tertanam mempengaruhi bagaimana realitas dipahami. *Kedua*, ketika menulis dan mengkonstruksi berita, wartawan mempertimbangkan karakteristik khalayak. *Ketiga*, proses konstruksi tersebut sangat ditentukan oleh proses produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi jurnalistik, dan standar profesional dari wartawan.

Pan dan Kosicki berasumsi bahwasanya setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame ini berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat frame-nya yang dimunculkan dalam teks. Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat struktur besar sebagai berikut:

Pertama, struktur **sintaksis**. Sintaksis adalah cara wartawan menyusun berita. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita dengan menggunakan piramida terbalik yang meliputi elemen *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, pernyataan, dan penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan (Eriyanto, 2002: 255)

Headline dapat disebut sebagai judul berita. Elemen *headline* dijelaskan sebagai elemen sintaksis dari wacana berita dengan tingkat penekanan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita, yang memengaruhi khalayak untuk mengerti cerita peristiwa pada realitas yang kemudian digunakan dalam pengertian isu dan peristiwa yang telah diungkapkan jurnalis. Penulisan *headline* digunakan untuk menunjukkan proses konstruksi suatu isu oleh jurnalis yang dilakukan dengan menekankan makna tertentu (Eriyanto, 2002: 257). Elemen *headline* pada media cetak memiliki banyak variasi untuk memberikan penekanan pada judul berita melalui judul yang ditulis dengan huruf besar, sedang, dan kecil. Variasi lainnya seperti ketebalan huruf, jenis huruf yang digunakan, dan letak penempatan judul. Dalam hal ini, judul berita berfungsi untuk mengiklankan cerita atau berita, meringkaskan atau mengikhtisarkan berita, dan mempercantik halaman surat kabar (Ishak, dkk, 2011: 128).

Terdapat empat jenis *headline* berdasarkan kepentingan berita, yaitu (a) *Banner headline*: berita yang sangat atau terpenting yang dideskripsikan dengan jenis dan ukuran huruf yang bersifat gagah dan kuat, artinya hurufnya terbesar dan lebih tebal. (b) *Spread headline*: berita penting dengan tampilan ukuran dan ketebalan huruf lebih kecil dari *banner headline*. (c) *Secondary headline*: berita yang kurang penting yang ukuran dan ketebalan hurufnya lebih kecil dari *spread headline*. Dan (d) *Subordinated headline*: berita yang dianggap tidak penting, namun sesekali diperlukan untuk menutup ruang kosong pada halaman surat kabar dengan ukuran dan ketebalan hurufnya lebih rendah dari jenis lainnya (Suhandang, 2004: 116),

Elemen kedua adalah *lead* yang sering disebut juga sebagai teras berita dan merupakan laporan berita singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkan jurnalis (Suhandang, 2004: 120). *Lead* terdiri atas satu alinea pendek yang merupakan intisari berita dengan menempatkan unsur *when* sebagai elemen penting. Beberapa fungsi *lead* adalah menjawab rumus 5W+1H. Menekankan nilai berita (*newsworthiness*) pada posisi awal berita, memberi identifikasi cepat terkait *who*, *where*, dan *what* yang dibutuhkan agar pembaca mudah memahami berita tersebut, dan mengiklankan isi berita secara keseluruhan supaya pembaca tertarik membaca berita hingga akhir berita (Ishak, dkk, 2011: 128-129).

Dalam penulisan *lead*, jurnalis dapat mengkategorisasikan berdasarkan pada penekanan salah satu unsur 5W+1H yang dituliskan pada awal kalimat. Pertama, *what lead* yang menekankan pada macam atau bentuk kejadiannya. Kedua, *who lead* yang mendeskripsikan orang-orang pada peristiwa yang diberitakan, contohnya korban, pelaku, ataupun orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Bentuk *lead* yang ketiga adalah *when lead* yang menekankan pada waktu peristiwa yang diberitakan tersebut. Bentuk keempat adalah *where lead* yang ditekankan pada tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kelima, *why lead* yang menjelaskan sebab terjadinya dari peristiwa yang diberitakan. Bentuk *lead* yang keenam, yaitu *how lead* dengan menekankan pada bagaimana peristiwa yang diberitakan dapat terjadi (Suhandang, 2004: 122-124).

Ketiga, **latar** merupakan bagian berita yang dapat memengaruhi makna yang ingin ditampilkan jurnalis. Dalam menulis berita, jurnalis akan mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Pemilihan latar menentukan sudut pandang khalayak hendak diarahkan kemana oleh jurnalis. Elemen penting lainnya adalah **kutipan dan sumber berita** yang digunakan untuk membangun objektivitas – prinsip keseimbangan dan tidak memihak

(Eriyanto, 2002: 259). Dalam suatu berita, kutipan dianggap dapat memberi emosi, jiwa, warna pada tulisan, lebih menarik, dan tidak membosankan untuk dibaca pembaca surat kabar. Kutipan dalam berita dapat diamati dengan penggunaan tanda petik yang diartikan sebagai kutipan langsung, sedangkan penggunaan kata menjelaskan atau menerangkan merupakan kutipan tidak langsung (Ishak, dkk, 2011: 129).

Penulisan kutipan digunakan untuk menandai dan mengungkapkan adanya pendapat dari narasumber yang berotoritas dan bukan pendapat jurnalis semata. Kutipan sumber berita menjadi perangkat *framing* atas (a) mengklaim validitas atau kebenaran pernyataan yang berdasar pada klaim otoritas akademik. (b) menghubungkan titik tertentu dari pendapat jurnalis (media) kepada pejabat yang berwenang. Dan (c) mengecilkan pendapat tertentu yang dihubungkan dengan pendapat mayoritas sehingga tampak sebagai penyimpangan (Eriyanto, 2002:259). Di sisi lain, pemilihan sumber berita dapat ditentukan dari ketenaran, kecakapan, dan pengaruh individu di masyarakat. Sumber berita dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu (a) tokoh masyarakat yang terdapat dalam suatu kelompok (politikus, tokoh intelektual, atau artis) dan (b) tokoh dalam berita, yaitu individu yang terlibat atau yang dianggap paling tahu terkait informasi yang dibutuhkan jurnalis dalam suatu peristiwa yang dipublikasikan oleh media (Djuraid, 2012: 22-25). Pendapat narasumber yang berotoritas atau dianggap ahli dalam bidang tertentu akan membantu jurnalis untuk membentuk sudut pandang yang objektif terhadap suatu pemberitaan.

Kedua, struktur **skrip**. Skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta. Pada umumnya, struktur skrip adalah pola **5W + 1H** (*what, who, when, where, why, dan how*). **What** menjelaskan apa yang terjadi. **Who** menjelaskan siapa yang terlibat. **When** menjelaskan bilamana terjadinya suatu peristiwa. **Where** mendeskripsikan tempat terjadinya peristiwa; **why** menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Dan **How** menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Pola 5W + 1H biasanya digunakan jurnalis untuk menuliskan *lead* dalam laporan berita sehingga khalayak tertarik untuk membaca berita tersebut dan memahami pesannya dengan jelas (Eriyanto, 2002: 260).

Struktur skrip menjelaskan strategi jurnalis dalam mengkonstruksi berita: bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip juga memberikan tekanan terhadap bagian berita yang akan didahulukan dan bagian lain yang dapat digunakan sebagai strategi untuk menyembunyikan

informasi penting. Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Eriyanto, 2002: 261).

Ketiga, struktur **tematik**. Tematik adalah cara wartawan menulis fakta. Struktur ini menjelaskan bagaimana suatu peristiwa diungkapkan oleh jurnalis. Pada struktur ini, jurnalis akan mengungkapkan fakta dengan memperhatikan kalimat yang dipakai, penempatan dan penulisan sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan (Eriyanto, 2002: 262). Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini, yaitu detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti.

Detail, elemen detail merupakan strategi bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Sikap atau wacana yang dikembangkan oleh wartawan kadangkala tidak perlu disampaikan secara terbuka, tetapi dari detail bagian mana yang dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan detail yang besar, akan menggambarkan bagaimana wacana yang dikembangkan oleh media. (Eriyanto, 2001: 238).

Koherensi sebagai jalinan antarkata, proposisi, atau kalimat. Ada beberapa macam koherensi, yaitu (a) koherensi sebab-akibat: proposisi/kalimat yang dipandang sebagai sebab atau akibat dari proposisi lainnya. (b) koherensi penjelas: proposisi/kalimat dinilai sebagai penjelas untuk kalimat lainnya. dan (c) koherensi pembeda: proposisi/kalimat yang dipandang kebalikan atau lawan dari kalimat lain. Koherensi berkaitan dengan proposisi yang digunakan dalam teks berita yang dapat dilihat dari penggunaan kata hubung (Eriyanto, 2002: 263).

Elemen lainnya adalah **bentuk kalimat** yaitu segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Di mana menanyakan apakah A yang menjelaskan B, atautkah B yang menjelaskan A. logika kausalitas ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). Bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Dalam kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subyek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif seseorang menjadi objek dari pernyataannya (Eriyanto, 2001: 251).

Elemen yang juga perlu diperhatikan adalah **kata ganti**, yang merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang dapat menggunakan kata ganti “saya” atau “kami” yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator

semata-mata (Eriyanto, 2001: 253). Dalam menulis berita, jurnalis dapat menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya sama dalam konteks yang sama pula sehingga berita tersebut menarik untuk dibaca (Ishak, dkk, 2011: 131-132).

Keempat, struktur **retoris**. Retoris adalah cara wartawan menekankan fakta. Struktur ini menunjukkan cara jurnalis untuk membentuk citra, meningkatkan penekanan pada bagian tertentu, dan meningkatkan citra yang diinginkan atas suatu berita. Proses retoris dilakukan supaya menunjukkan bahwa berita yang disampaikan merupakan suatu fakta atau kebenaran (Eriyanto, 2002: 264). **Leksikon** (kosakata), pemiliha kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda (Eriyanto, 2001: 255).

Elemen lain yang digunakan adalah **grafis**, merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, ukuran huruf, dan penggunaan garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk didalamnya adalah pemakaian gambar, *caption*, *raster*, grafik, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan. Bagian-bagian yang ditonjolkan ini menekankan kepada khalayak pentingnya bagian tersebut. Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, dimana ia mengiginkan khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut (Eriyanto, 2001: 257-258). Elemen yang ketiga adalah **metafora**, dalam suatau wacana seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu berita (Eriyanto, 2001: 259).

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Tendensi atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur tersebut.

2.6 Manajemen Penyelenggaraan Haji

2.6.1 Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan” , dalam bahasa Italia *Maneggiare* bereati “mengendalikan”, kemudian bahasa Perancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to*

manage yang berarti “mengatur”. Pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan *manajemen*. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi social, organisasi pemerintah dan sebagainya (Effendi, 2011: 1).

2.6.2 Penyelenggaraan Ibadah Haji

Hakikat penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji, mulai dari saat pendaftaran hingga kembali lagi ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi serta kesehatan.

Dengan demikian, manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan dalam kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, baik *planning*, *organizing*, *controlling*, maupun *evaluating*, untuk mencapai suatu tujuan sehingga terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam mengedepankan kepuasan jamaah haji, dasar pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yakni bagaimana cara mengatur perencanaan (mulai persiapan ibadah haji, ketika ibadah haji, dan pasca ibadah haji) yang diorganisasikan oleh penyelenggara, baik pemerintah maupun swasta atau lembaga keagamaan. Diatur dengan administrasi yang baik dari mulai proses pendaftaran, pendataan jamaah dan petugas, serta berbagai macam persyaratan birokrasi. Kemudian diinformasikan melalui komunikasi yang baik, baik melalui bimbingan maupun media cetak atau media elektronik. Setelah itu, dilakukan pengawasan dan evaluasi yang kontinu agar sukses dalam semua bidang dan lebih baik lagi ke depannya (Sukayat, 2016: 82-84).

a. Perencanaan Sebelum Haji

Perencanaan sebelum/prahaji berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum pemberangkatan ke Tanah Suci. Perencanaan sebelum haji secara garis besar berkaitan dengan kuota, pendaftaran, serta persiapan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji.

Ketentuan umum tentang persyaratan melaksanakan ibadah haji bagi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Memiliki KTP yang masih berlaku.
3. Berdomisili di Indonesia.
4. Sehat jasmani dan ro uphani.
5. Calon jamaah haji wanita disertai mahrom.
6. Mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang ada di Bank yang di tunjuk pemerintah.
7. Melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).
8. Akbarmendaftar di Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili calon jamaah.
9. Khusus bagi warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia dan ingin menunaikan ibadah haji, selain harus memenuhi persyaratan di atas (point 1 s.d 8), pengaturannya dilakukan sebagaimana prosedur negara asing yang akan berangkat ke luar negeri dengan persyaratan :
 - a) Memiliki paspor kebangsaan yang berlaku atas namanya dan berangkat haji degan menggunakan paspor kebangsaanya.
 - b) Memiliki dokumen keimigrasian atau izin tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya enam bulan.
 - c) Memiliki izin masuk kembalia atau *re entery permit*.
 - d) Tidak tercantum dalam cegah tangkal (Sukayat, 2016: 84-85).

b. Perencanaan Pelaksanaan Haji

Bimbingan di Arab Saudi (pendampingan) dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun, secara operasional, kerja team merupakan tugas bersama seluruh aparat petugas kloter (TPHI, TPIHI, Karu, dan Karom). Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pendampingan disetiap pelaksanaan, jenis, dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian.
2. Konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya.

Perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan haji meliputi perencanaan tentang penentuan dan petunjuk ketua regu (Karu), ketua rombongan (Karom),

perencanaan pengelolaan jamaah haji saat pelaksanaan haji di Makkah, hingga perencanaan akomodasi saat pelaksanaan haji di Makkah (Sukayat, 2016: 87-88).

c. Perencanaan Pasca Pelaksanaan Haji

1. Pemulangan, sesuai dengan jadwal kepulangan. Jamaah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu, akan pulang ke Indonesia gelombang pertama, sedangkan bagi jamaah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi, terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan *sholet arba'in* dan wisata agama.
2. Penempatan jamaah di hotel transit, masa tinggal di hotel transit selama 24 jam. Selama di hotel transit jamaah haji mendapatkan pelayanan penempatan, catering, *city tour*, dan pemberangkatan ke bandara yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak hotel dan menjadi satu paket pelayanan dalam kontrak. Pemberangkatan jamaah haji ke Bandara ditetapkan empat sampai tujuh jam sebelum jadwal pesawat *take off* (Sukayat, 2016: 88-89).